

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Kerangka Teori.....	11
1.5.1. Teori Wewenang.....	11
1.5.2. Teori Perbuatan Pemerintah.....	12
1.5.3. Teori Pertanggung Jawaban.....	13
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.6.1. Metode Penelitian	14
1.6.2. Pendekatan Penelitian	15
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	16
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5. Analisa Bahan Hukum	19
1.7. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPUTUSAN TERTULIS YANG MENCAKUP TINDAKAN FAKTUAL

2.1. Wewenang Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....	21
2.2. Unsur Keabsahan Tindakan Pemerintah	24
2.3. Jenis Tindakan Pemerintah.....	28
2.4. Upaya Perlindungan Hukum Atas Keputusan Tertulis yang Mencakup Tindakan Faktual.....	37

BAB III : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENANGANAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA ATAS KEPUTUSAN TERTULIS YANG MENCAKUP TINDAKAN FAKTUAL

3.1. Pengajuan Gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara	52
---	----

3.2. Kompetensi Absolut Terkait atas Sengketa Keputusan Tertulis yang Mencakup Tindakan Faktual	58
3.3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas Sengketa Keputusan Tertulis yang Mencakup Tindakan Faktual	63

BAB IV : KESIMPULAN

DAFTAR BACAAN

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN
PENGADILAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3448)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 yang Telah Dicitak Ulang)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaanya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3448)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 144 K/TUN/1998 tanggal 29 September 1999.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 11/G/2017/PTUN.JPR

Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN.KTB